

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Tiongkok sebagai negara yang memiliki kapasitas untuk menjadi negara hegemoni secara global tentunya memiliki langkah-langkah strategis untuk memenuhi kepentingannya. Hal ini kemudian berkaitan dengan pengaruhnya dalam lingkup geopolitik dan geostrategis. Bukan hanya permasalahan kewilayahan dan batas teritori, Tiongkok juga memiliki kepentingan akan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya sebagai negara agar tetap menjadi kekuatan yang di pandang dalam skala global. Keterkaitan antar geopolitik yang mengelaborasi kepentingan wilayah teritori sumber daya alam, dan pengaruh dalam kawasan dapat dilihat dari bagaimana tindakan Tiongkok yang mengeksploitasi sumber daya strategis air di Tibet yang menjadi menara air di Asia karena menjadi hulu sungai-sungai besar di Asia.

Keuntungan teritori yang dimiliki Tiongkok atas wilayah Tibet semenjak aneksasinya pada tahun 1950, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan Tiongkok menjadi kekuatan utama di Asia. Tibet kini telah menjadi *heartland* bagi Tiongkok sebagai usaha perluasan pengaruhnya kewilayah *rimland* secara geopolitik dan telah terintegrasi dengan proyek global Tiongkok di dalam BRI. Hal ini kemudian diimplementasikan Tiongkok melalui serangkaian kebijakan geostrategisnya yang memanfaatkan Tibet sebagai wilayah *buffer zone* yang bersinggungan dan menjadi tumpuan negara-negara hilir atas sumber daya airnya. Kebijakan-kebijakan pembangunan Tiongkok seperti pembangunan bendungan dan pengalihan aliran air sungai memiliki dampak signifikan terhadap negara-negara hilir yang juga bergantung terhadap sungai lintas batas yang mengalir dari Tibet.

Hal ini dapat tergambarkan dalam relasi Tiongkok dalam menghadapi negara-negara hilir di Sungai Mekong yang merasa dirugikan atas tindakan-tindakan Tiongkok sebagai negara hulu yang memegang otoritas atas sungai lintas batas di Tibet. Sebagai negara yang memiliki pengaruh besar, tentunya kebijakan Tiongkok juga memiliki peranan penting dan memengaruhi kawasan Asia Tenggara. Hal ini kemudian menimbulkan relasi konflik-kerja sama antar negara yang memiliki kepentingan atas sumber daya air di Sungai Mekong. Tiongkok lebih memilih pendekatan bilateral dan menghindari obligasinya untuk tunduk dalam rezim air internasional, dengan dorongan untuk menyelesaikan masalah dengan negara-negara tetangganya secara regional. Kebijakan ini kemudian juga memengaruhi kompleksnya hubungan dengan negara-negara riparian Sungai Mekong.

Dilema yang terjadi adalah ketika Tiongkok yang menggunakan pengaruh agar negara-negara Mekong mengalami dependensi dengan Tiongkok. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dan dimanfaatkan Tiongkok dalam berbagai kebijakan hidropolitiknya seperti menghindari keanggotaan di forum multilateral dan hanya memilih menjadi mitra dialog serta inisiasinya sebagai *founder* dari LMC. Tindakan ini kemudian dapat dilihat sebagai perwujudan hegemoni geopolitik Tiongkok atas *rimland* agar negara-negara riparian Sungai Mekong tetap patuh terhadap kebijakan Tiongkok. Pada dasarnya, inisiasi pembentuk LMC diperuntukan untuk sebagai wadah mencapai *mutual agreement* dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing negara hulu dan negara hilir terkait eksploitasi sumber daya air di Sungai Mekong.

Dilain sisi, efek domino yang terjadi dari eksploitasi aliran sungai lintas batas yang dilakukan Tiongkok memiliki dampak signifikan terhadap masing-masing negara. Sebagian negara mengalami dilema kekeringan dan mengancam komoditas pangan dan negara lainnya juga memiliki menghadapi fluktuasi aliran Sungai Mekong yang tidak sesuai dengan kebutuhan domestiknya. Pemanfaatan aliran sungai juga dilakukan sebagai pembangkit listrik oleh negara-negara riparian,

namun hal ini juga membentuk permasalahan ekologis sungai lainnya. Tiongkok sebagai negara yang memiliki kekuatan ekonomi juga turut andil dalam pembangunan bendungan di berbagai negara riparian, dan hal ini memperluas hegemoni Tiongkok atas negara-negara tersebut yang dibalut dalam konsep kerja sama bilateral antar negara.

6.2. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis menghubungkan permasalahan yang terjadi terkait sumber daya air antara Tiongkok sebagai negara hulu aliran sungai lintas batas dan negara riparian Sungai Mekong dan mengidentifikasi berbagai hal yang dapat dijadikan saran oleh penulis kedepannya. Penulis sadar akan keterbatasan data dan keterbatasan penelitian yang tidak secara spesifik mendalami relasi bilateral antara Tiongkok dan masing-masing negara riparian Sungai Mekong serta data pengaruh langsung proyek pengalihan air yang dilakukan oleh Tiongkok. Hal ini menjadi saran akademis bagi peneliti untuk menjadi fokus penelitian selanjutnya.

Selanjutnya untuk saran kebijakan, penulis merekomendasikan bahwa penekanan kerja sama harus lebih inklusif melalui mekanisme di dalam LMC, dikarenakan adanya perbedaan konsep dan pandangan antara Tiongkok dan negara riparian lainnya mengenai hak eksploitasi atas sungai lintas batas. Selain itu penulis juga menyarankan isu utama keamanan air menjadi fokus pembahasan bersama di Sungai Mekong melalui peningkatan kerja sama masing-masing negara. Tiongkok sebagai negara *emerging power* yang kuat secara geopolitik melalui inisiasi BRI-nya diharapkan mampu memberikan banyak manfaat kepada negara riparian dalam sektor pembangunan dan ekonomi sebagai perwujudan timbal balik kebijakan Tiongkok.

Tiongkok dilain sisi sebagai negara yang berkepentingan dan memiliki ambisi besar harus memperkuat legitimasinya di Tibet, dan penguatan kembali

92

Ivanno Julius Reynaldi, 2022

HIDROPOLITIK TIONGKOK DI ASIA: PENGARUH GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGIS TIONGKOK TERKAIT SUMBER DAYA STRATEGIS AIR DI TIBET TERHADAP KEAMANAN AIR DI NEGARA-NEGARA RIPARIAN SUNGAI MEKONG

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

seluruh integrasi teritorial yang mendukung posisinya di Tibet. Tiongkok juga harus terus memperhatikan relasi dengan negara tetangganya terutama negara hilir lainnya yang bergantung kepada aliran air Tibet sebagai antisipasi terjadinya *counterbalancing* dari negara lainnya yang dapat merusak hegemoni geopolitik Tiongkok di Asia. Untuk menunjang *good neighborhood policy*-nya, penulis menyarankan agar Tiongkok lebih komprehensif dalam kerja sama bilateral antar negara-negara hilirnya untuk mengurangi efek negatif dari pembangunan yang dilakukan sebagai negara hulu.